

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN DAN LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

(Studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

YOSEPH DIMAS EDO PERWIRA
NIM. C2C009115

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2013

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Yoseph Dimas Edo Perwira
Nomor Induk Mahasiswa : C2C009115
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
DAN LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN** (Studi empiris
pada perusahaan industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan
2011)

Dosen Pembimbing : Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt.

Semarang, 7 Maret 2013

Dosen Pembimbing,

(Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt.)

NIP. 19610109 198803 1001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Yoseph Dimas Edo Perwira

Nomor Induk Mahasiswa : C2C009115

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN
DAN LUAS PENGUNGKAPAN TANGGUNG
JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN** (Studi empiris
pada perusahaan industri dasar dan kimia yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan
2011)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 19 Maret 2013

Tim Penguji

1. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. (.....)
2. Prof. Drs. H. Arifin S., MCom, Hons, Ph.D, Akt (.....)
3. Aditya Septiani, SE, MSi, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Yoseph Dimas Edo Perwira, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Struktur Tata Kelola Perusahaan dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011), adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis lainnya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik sengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima

Semarang, 6 Maret 2013

Yang membuat pernyataan,

Yoseph Dimas Edo Perwira

NIM: C2C009115

ABSTRACT

This study examines the effects of corporate governance structures to the size of corporate social responsibility disclosure in a firm's annual reports. This size of corporate social responsibility disclosure includes environment, energy, employee's health and safety, employee's other needs, products, community involvement, and others. Previous research review show that there is no consistency and give many variety results. This study attempts to examine it with 7 independent variables (4 research variables and 3 control variables). These variables are independent commissioner, audit committee, public ownership, foreign ownership, profitability, leverage, and firm's size.

Sample that used in this study was extracted with using purposive sampling method. The population is 57 basic and chemical industry firms that listed in Indonesian Stock Exchange (IDX). Research periods are 2010 and 2011. After reduces with several criteria, 37 firms are determined as firms samples and 68 annual reports as research samples. The analysis technique in this study uses a multiple regression analysis with help from a program named SPSS.

The result indicates that no research variables show any significant effects because the structures of corporate governance in Indonesia aren't implemented effectively. Leverage and firm's size as control variables have significant effects to the size of corporate social responsibility disclosure in a firm's annual reports.

Keywords : Stakeholder theory, legitimacy theory, agency theory, corporate governance, size of corporate social responsibility, independent commissioner, audit committee, public ownership, foreign ownership

ABSTRAK

Penelitian ini menguji pengaruh faktor-faktor struktur tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan. Luas pengungkapan tanggung jawab sosial ini memuat lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, kebutuhan lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat, dan lainnya. Tinjauan penelitian sebelumnya menunjukkan tidak ada konsistensi dan memberi beberapa hasil yang bervariasi. Penelitian ini berusaha untuk mengujinya dengan 7 variabel independen (4 variabel penelitian dan 3 variabel kontrol). Variabel itu adalah komisaris independen, komite audit, kepemilikan publik, kepemilikan asing, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Populasi penelitian ini adalah 57 perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Setelah pengurangan dengan beberapa kriteria, 37 perusahaan ditetapkan sebagai sampel perusahaan dan 68 laporan tahunan sebagai sampel penelitian. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan bantuan program bernama SPSS. Periode penelitian adalah tahun 2010 dan 2011.

Hasil menunjukkan bahwa tidak ada variabel penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan karena struktur tata kelola perusahaan di Indonesia tidak diimplementasikan dengan efektif. Leverage dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol mempunyai pengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan perusahaan.

Kata Kunci : Teori *stakeholder*, teori legitimasi, teori agensi, tata kelola perusahaan, luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, komisaris independen, komite audit, kepemilikan publik, kepemilikan asing.

MOTO DAN PERSEMBAHAN

Si Deus pro nobis, quis contra nos?

(Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita?)

Roma 8:31

Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1:7

Skripsi ini aku persembahkan untuk

keluargaku (Bapak, Ibu, Mbak Novie, dan Mas Tius),

teman-teman Akuntansi FEB Undip 2009

serta saudara-saudara PMK FEB Undip

Tuhan memberkati kita semua

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan anugerahNya dan selalu menyertai penulis sehingga skripsi dengan judul **“Struktur Tata Kelola Perusahaan dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011)”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini dapat terselesaikan karena bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Drs. Mohamad Nasir, M.Si., Akt., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Muchamad Syafruddin, Msi., Akt. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
3. Dr. P. Basuki Hadiprajitno, MBA, MAcc, Akt. selaku dosen pembimbing atas motivasi, perhatian, bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
4. Drs. Sudarno, M.Si., Akt., Ph.D selaku dosen wali yang telah membimbing penulis dari awal hingga akhir studi.
5. Para dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
6. Staf Tata Usaha dan Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu penulis selama proses studi.

7. Keluarga Sudiarto (Bapak, Ibu, Mbak Novie, dan Mas Tius), sanak keluarga lain, dan keluarga besar Yavet Montalili yang selalu mendukung, memberi semangat, dan berdoa untuk penulis dalam mengerjakan skripsi ini.
8. Keluarga Mahasiswa Akuntansi FEB Undip khususnya angkatan 2009 Reguler 1 (Putu, Dila, Mayco, Mona, Angga, Era, Chandra, Tegar, Nandana, Andreas, Henry, Arin, Monica, Letsa, Alvin, Sigit, Alfian, Anggi, Leo, Ivan, Elin, dll) yang telah menjadi teman yang sangat baik dan membantu penulis dalam belajar selama kuliah.
9. Saudara-saudara satu bimbingan Pak Basuki (Nessya, Liste, Togi, Bagas, Mahendra, Rudi, dan Tito Gustiandika) yang selalu saling memberikan semangat, dukungan, ilmu, dan informasi saat penyusunan skripsi ini.
10. Saudara kelompok kecil PMK FEB Undip (Bang Suryanto, Togi, Arya, Petrus, Andrian, Randy Harris, Randy Yosua, Ricko, dan Charles) yang selalu mendukung dan memberi semangat kepada penulis.
11. Saudara seperjuangan dalam Pengurus PMK FEB Undip khususnya Bidang Litbang (Kak Anita, Vera, Arya, Brilliant, Yosua, Inka, Essy, Yosevine, Ribka, Claudya, Paguh, dan Samuel) yang selalu setia menopang penulis dalam berbagai keadaan.
12. Keluarga besar PMK FEB Undip, Obkial, dan Refomedia (Mas Aan, Kak Delima, Mas Abas, Kak Mery, Kak Metta, Mas Nehe, Mas Ferry, Kak Lidya, Kak Devi, Bang Binsar, Bang Arif, Bang Anthony, Mbak Petri, Kak Vellina, Hansen, Mike Laurent, Winda, Renhard, Fendy, Chika, Kiki, Nandana, Naomi, Hayu, Gusrida, Adiel, Milka, Kikis, Olin, Elma, Doly, Tia, Yonatan,

- Evans, Santa, Paskah, Rani, Putri, dll) yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkembang dan bertumbuh.
13. Keluarga KKN Kedungmutih, Wedung, Demak (Pak Hamdan dan keluarga, perangkat desa, Ayu, Monica, Aggy, Nadhila, Nieke, Ismi, Fergy, Wiwid) yang telah banyak memberikan pelajaran hidup selama KKN.
 14. Saudara-saudara seperjuangan penulis yang lain (Reky, Asiska, Tridesfia, Lia, Firsty, Kintan, Mahendra, Dimas, Rangga, dan Jazzy) yang telah memberikan semangat, dukungan, dan doa kepada penulis saat penyelesaian skripsi ini.
 15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung penulis dalam penulisan skripsi ini.

Semarang, 6 Maret 2013

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	5
1.3.2 Kegunaan Penelitian	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TELAAH PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Teori <i>Stakeholder</i>	8
2.1.2 Teori Legitimasi.....	9
2.1.3 Teori Agensi	10

2.1.4	Tata Kelola Perusahaan	11
2.1.5	Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	12
2.1.6	Komisaris Independen	13
2.1.7	Komite Audit	14
2.1.8	Kepemilikan Publik	15
2.1.9	Kepemilikan Asing	16
2.2	Penelitian Terdahulu.....	17
2.3	Kerangka Pemikiran	20
2.4	Hipotesis	20
2.4.1	Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	20
2.4.2	Komite Audit dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial.....	22
2.4.3	Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	23
2.4.4	Kepemilikan Asing dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial	24
BAB III METODE PENELITIAN.....		26
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasi	26
3.1.1	Variabel Dependen	26
3.1.2	Variabel Independen.....	27
3.1.2.1	Komisaris Independen	27
3.1.2.2	Komite Audit	28

3.1.2.3	Kepemilikan Publik	28
3.1.2.4	Kepemilikan Asing	29
3.1.2.5	Variabel Kontrol	29
3.2	Populasi dan Sampel.....	30
3.3	Jenis dan Sumber Data	31
3.4	Metode Pengumpulan Data	31
3.5	Metode Analisis Data	32
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	32
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	32
3.5.2.1	Uji Multikolinearitas.....	32
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas	32
3.5.2.3	Uji Normalitas.....	33
3.5.2.4	Uji Autokorelasi.....	34
3.5.3	Analisis Regresi Berganda.....	34
3.5.4	Uji Hipotesis	35
3.5.4.1	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	35
3.5.4.2	Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	36
3.5.4.3	Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		37
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	37
4.2	Analisis Data	38
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	38

4.2.1.1 Statistik Deskriptif Luas Pengungkapan	
Tanggung Jawab Sosial	39
4.2.1.2 Statistik Deskriptif Komisaris Independen	39
4.2.1.3 Statistik Deskriptif Komite Audit	39
4.2.1.4 Statistik Deskriptif Kepemilikan Publik	40
4.2.1.5 Statistik Deskriptif Kepemilikan Asing	40
4.2.1.6 Statistik Deskriptif Profitabilitas	41
4.2.1.7 Statistik Deskriptif <i>Leverage</i>	41
4.2.1.8 Statistik Deskriptif Ukuran Perusahaan	41
4.2.2 Uji Asumsi Klasik	42
4.2.2.1 Uji Multikolinearitas	42
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas	43
4.2.2.3 Uji Normalitas	45
4.2.2.4 Uji Autokorelasi	45
4.2.3 Analisis Regresi Berganda	46
4.2.4 Uji Hipotesis	48
4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)	48
4.2.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)	49
4.2.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)	50
4.3 Pembahasan	53
BAB V PENUTUP	58
5.1 Kesimpulan	58

5.2 Keterbatasan	59
5.3 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	60

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	17
Tabel 4.1 Seleksi Sampel Penelitian	37
Tabel 4.2 Hasil Statistik Deskriptif	38
Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas dengan Tolerance dan VIF	42
Tabel 4.4 Hasil Uji Park.....	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	45
Tabel 4.6 Hasil Runs Test	46
Tabel 4.7 Hasil Regresi Berganda.....	47
Tabel 4.8 Koefisien Determinasi	48
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F.....	49
Tabel 4.10 Ringkasan Uji Statistik t.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	20
Gambar 4.1 Grafik Plot.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tata kelola perusahaan saat ini merupakan hal yang penting dan banyak dilakukan oleh berbagai perusahaan. Dahya (dalam Khan, 2010) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggungjawab atas arah perusahaan kepada stakeholder. Maier (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan manajemen perusahaan, dewan komisaris, penanam saham, dan *stakeholder* lain. Claessens (dalam Khan, 2010) juga memberikan penjelasan bahwa tata kelola perusahaan adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial atau antara tujuan individu dan tujuan kelompok.

Khan (2010) menyatakan tata kelola perusahaan adalah proses para dewan dan auditor mengelola tanggung jawab mereka kepada penanam modal dan *stakeholder* lain. Untuk penanam modal, tata kelola perusahaan digunakan untuk menambah kepercayaan akan pengembalian yang sesuai dari investasi mereka. Untuk stakeholder perusahaan lain, tata kelola perusahaan akan memberikan jaminan bahwa perusahaan bertanggungjawab untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan itu. McLaren (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada *stakeholder* disebabkan karena perusahaan bergantung pada sumber daya yang dimiliki *stakeholder*.

Teori legitimasi sering dipakai oleh para peneliti untuk menjelaskan hubungan antara tata kelola perusahaan dengan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Sethi (dalam Khan *et al*, 2012) berpendapat bahwa *legitimacy gap* bisa timbul jika ada perbedaan antara nilai perusahaan dan nilai sosial. Ini bisa membahayakan legitimasi perusahaan di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, Khan *et al* (2012) berkesimpulan bahwa pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan mengungkapkannya secara bertanggung jawab kepada para *stakeholder* perlu dilakukan untuk mengurangi *legitimacy gap*. Ini bertujuan agar organisasi mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi memberikan manfaat dan tidak berbahaya. Struktur tata kelola perusahaan seperti kepemilikan dan komposisi dewan mempunyai peran vital untuk mengurangi *legitimacy gap*.

Kesimpulan yang bisa didapat dari dua paragraf sebelumnya adalah (1) tata kelola perusahaan adalah alat untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomis perusahaan dan tujuan sosial kepada para *stakeholder*, (2) tata kelola perusahaan merupakan hal yang penting sebagai alat yang digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan *stakeholdernya*, dan (3) *legitimacy gap* antara tujuan ekonomis dan tujuan sosial bisa dikurangi dengan cara melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaporkannya agar perusahaan mendapatkan dukungan dari para *stakeholdernya*.

Penelitian tentang pengaruh tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sudah banyak dilakukan oleh

banyak peneliti baik dari dalam negeri maupun luar negeri seperti penelitian dari Sembiring (2005), Novita *et al* (2008), Khan (2010), Mulia (2010), Mardi(2010), Sinaga (2011). Ratnasari (2011) dan Khan *et al* (2012). Hasil dari penelitian-penelitian itu bermacam-macam dan cenderung tidak konsisten. Siregar dan Utama (dikutip oleh Hadiprajitno, 2012) menunjukkan bahwa mekanisme tata kelola perusahaan di Bursa Efek Indonesia tidak konsisten pengaruhnya karena mekanisme tata kelola perusahaan di Indonesia masih baru pasca krisis 1997 sehingga belum optimum hasilnya.

Ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian baik dari luar negeri dengan dalam negeri itu mendorong adanya penelitian ini untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu industri yang lebih spesifik. Penelitian ini ditetapkan untuk memakai perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai sampel penelitian. Pemilihan sampel perusahaan industri dasar dan kimia yang diambil dari Bursa Efek Indonesia mempunyai alasan yaitu laporan tahunan perusahaan yang *go public* lebih mudah didapat dan perusahaan industri dasar dan kimia adalah bagian dari kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.. Alasan lain adalah perusahaan industri dasar dan kimia adalah industri yang berhadapan langsung dengan lingkungan sehingga wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.

Faktor-faktor lain yang melekat dengan karakteristik perusahaan yang mempengaruhi luas pengungkapan tetapi bukan tujuan dari penelitian ini dimasukkan sebagai variabel kontrol yaitu profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Tiga variabel kontrol ini dipakai karena sudah banyak dipakai untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian ditetapkan untuk diberi judul “Struktur Tata Kelola Perusahaan dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi empiris pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 dan 2011)”

1.2 Rumusan Masalah

Tata kelola perusahaan di Indonesia merupakan hal yang penting. Tata kelola perusahaan penting karena bisa berpengaruh pada keseimbangan nilai yang didapat perusahaan dengan nilai yang diberikan kepada masyarakat (Claessens, 2003 dalam Khan, 2010). Hal ini semakin diperkuat dengan adanya pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia yaitu Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia yang dibuat oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2006. Namun, ketidakkonsistenan hasil beberapa penelitian tentang pengaruh struktur tata kelola perusahaan dengan tanggung jawab sosial perusahaan dan kurangnya penelitian di Indonesia tentang pengaruh struktur kepemilikan publik membuat realita pelaksanaan struktur tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan tidak sesuai teori yang sudah ada. Rumusan masalah yang bisa disusun berdasarkan argumentasi itu adalah sebagai berikut:

1. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
2. Apakah komite audit berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
3. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?
4. Apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis:

1. Pengaruh komisaris independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Pengaruh komite audit terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Pengaruh kepemilikan publik terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
4. Pengaruh kepemilikan asing terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini digunakan sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2. Bagi pembaca, penelitian ini bisa digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan pengetahuan tentang luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
3. Bagi pihak universitas, penelitian ini bisa digunakan untuk menambah literatur tentang kualitas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dan menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan ini dibagi menjadi lima bab. Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi telaah pustaka yang dilakukan. Bab ini berisi teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian. Bab ini juga berisi kerangka pemikiran penelitian dan hubungan antar variabel dependen dan independen yang disajikan dalam hipotesis penelitian.

Bab ketiga berisi metode penelitian. Bab ini berisi deskripsi variabel-variabel penelitian dan operasional penelitian, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab keempat berisi tentang hasil dan pembahasan. Bab ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis data dengan alat dan teknik analisis yang digunakan, serta interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil.

Bab terakhir yaitu penutup yang berisi kesimpulan tentang hasil penelitian. Dalam bab ini juga disebutkan tentang keterbatasan penelitian yang ditemukan dan saran-saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Ghozali dan Chariri (2007) berkesimpulan dalam teori *stakeholder* bahwa perusahaan bukanlah entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada *stakeholdernya* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan masyarakat). Keberadaan perusahaan itu tergantung oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholdernya*.

Solomon (2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan agar perusahaan terus mendapat dukungan dari *stakeholdernya*. Ullman (dalam Ghozali dan Chariri, 2007) memberikan pendapat bahwa perusahaan melakukan berbagai cara untuk mencari perhatian dan mengendalikan *stakeholdernya* dengan strategi yang diadopsi perusahaan. Strategi itu terdiri dari dua macam, yaitu strategi aktif dan pasif. Strategi aktif merupakan strategi untuk terus memonitor dan berusaha mempengaruhi *stakeholder* yang dipandang berpengaruh/penting. Strategi pasif merupakan strategi yang cenderung tidak terus menerus memonitor dan mempengaruhi *stakeholder* dan secara sengaja tidak berusaha untuk menarik perhatian dari *stakeholder*. Kurangnya perhatian

kepada *stakeholder* mengakibatkan rendahnya tingkat pengungkapan informasi sosial dan kinerja sosial perusahaan

Kesimpulan dari uraian-uraian itu adalah perusahaan tidak hidup sendiri dan akan terus berhubungan dengan *stakeholdernya*. Kemampuan perusahaan untuk menarik perhatian dari *stakeholder* bisa membuat *stakeholder* memberikan dukungan kepada perusahaan. Hal yang bisa dilakukan untuk menarik perhatian dari *stakeholder* adalah dengan melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi menjelaskan hubungan perusahaan dengan masyarakat. Dowling dan Pfeffer (dalam Ghazali dan Chariri, 2007) menjelaskan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai perusahaan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat dimana perusahaan merupakan bagian di dalamnya. Jika nilai-nilai dari perusahaan dan masyarakat selaras, legitimasi perusahaan atau pengesahan keberadaan perusahaan di dalam masyarakat bisa tercapai. Jika perusahaan tidak bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai masyarakat, keberadaan dan pengesahan perusahaan bisa terancam.

Khan *et al* (2012) juga menjelaskan bahwa teori legitimasi biasanya digunakan untuk menjelaskan motivasi pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan *et al* menambahkan motivasi perusahaan melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah untuk mendapatkan dukungan dari *stakeholder* dan bisa melanjutkan aktivitasnya selama organisasi

memberikan manfaat dan tidak berbahaya seperti mengelola limbah berbahaya, mengurangi dampak polusi, dan mensejahterakan warga sekitar pabrik.

Kesimpulan dari dua paragraf sebelumnya adalah perusahaan perlu menyesuaikan nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai di masyarakat agar memperoleh legitimasi atau pengesahan dari masyarakat. Legitimasi itu berguna agar perusahaan mendapatkan dukungan dari stakeholder dan bisa melanjutkan aktivitasnya.

2.1.3 Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal (Hendriksen, 2002). Agen mempunyai kontrak untuk melaksanakan tanggung jawab tertentu dan melaporkannya kepada prinsipal sedangkan prinsipal mempunyai kontrak untuk memberi upah kepada agen. Prinsipal disebut sebagai penilai informasi sedangkan agen disebut sebagai pembuat keputusan. Penilai informasi bertanggungjawab untuk memilih sistem informasi yang bisa digunakan oleh pembuat keputusan untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan pemilik perusahaan dari sudut keberadaan informasi untuk mereka.

Hendriksen menjelaskan bahwa hal yang timbul dari adanya teori agensi adalah ketidaklengkapan informasi yang diberikan kepada prinsipal. Ketidaklengkapan informasi ini disebut sebagai *information asymmetries*. Contohnya adalah pemilik bisa tidak tahu keputusan yang diambil oleh manajer dengan jelas. Ini yang membuat mereka kesulitan untuk menghitung upah dan bonus kepada manajer karena pemilik perusahaan tidak bisa mengamati semua kegiatan yang dilakukan oleh manajer dan prestasi yang didapat manajer.

Kegiatan yang dilakukan oleh manajer mungkin berbeda dengan keputusan yang sudah ditentukan oleh pemilik karena manajer mempunyai rancangan pilihan tersendiri atau mungkin manajer ingin mencurangi pemilik perusahaan lewat informasi yang diberikan ke pemilik perusahaan.

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah agensi ini. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena dengan pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Hal yang dapat disimpulkan adalah manajer bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan yang dimiliki pemilik perusahaan dan bertanggung jawab atas pelaporannya. Potensi yang timbul adalah kecurangan manajer dalam melaporkan laporan kegiatan perusahaan. Tata kelola perusahaan mempunyai peran untuk mengurangi potensi kecurangan manajer ini.

2.1.4 Tata Kelola Perusahaan

Maier (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tata kelola perusahaan merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan manajemen perusahaan, dewan komisaris, penanam saham, dan *stakeholder* lain. Claessens (dalam Khan, 2010) juga memberikan penjelasan bahwa tata kelola perusahaan adalah usaha untuk menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan tujuan sosial atau antara tujuan individu dan tujuan kelompok. Dahya (dalam Khan, 2010) berpendapat bahwa tata kelola perusahaan digunakan sebagai cara untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggungjawab atas arah perusahaan kepada *stakeholder*.

Khan (2010) menyatakan tata kelola perusahaan adalah proses para dewan dan auditor mengelola tanggung jawab mereka kepada penanam modal dan *stakeholder* lain. Untuk penanam modal, tata kelola perusahaan digunakan untuk menambah kepercayaan akan pengembalian yang sesuai dari investasi mereka. Untuk *stakeholder* perusahaan lain, tata kelola perusahaan akan memberikan jaminan bahwa perusahaan bertanggungjawab untuk mengelola dampak lingkungan dan sosial yang ditimbulkan karena keberadaan perusahaan itu. McLaren (dalam Khan, 2010) menjelaskan bahwa tanggung jawab yang diberikan perusahaan kepada *stakeholder* disebabkan karena perusahaan bergantung pada sumber daya yang dimiliki *stakeholder*.

Kesimpulan dari beberapa dua paragraf itu adalah tata kelola perusahaan merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan perusahaan dengan *stakeholdernya*, tata kelola perusahaan adalah alat untuk mengendalikan perusahaan agar bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomis perusahaan dan tujuan sosial kepada para *stakeholder*.

2.1.5 Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Hackston dan Milne (dalam Sembiring, 2005) mendefinisikan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai proses mengkomunikasikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi kepada kelompok khusus yang berkepentingan dan kepada masyarakat secara keseluruhan. Ghazali dan Chariri (2007) mendefinisikan pengungkapan sosial dan lingkungan sebagai proses yang digunakan oleh perusahaan untuk

mengungkapkan informasi berkaitan dengan kegiatan perusahaan dan pengaruhnya terhadap kondisi sosial masyarakat dan lingkungan.

Novita *et al* (2008) juga memberikan penjelasan bahwa pengungkapan tanggung jawab sosial adalah salah satu media yang dipilih perusahaan untuk memperlihatkan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat di sekitarnya. Novita *et al* menambahkan jika perusahaan memiliki kontrak dengan stakeholder asing baik dalam kepemilikan atau dalam perdagangan, perusahaan akan lebih didukung dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial.

Kesimpulan yang bisa diambil adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan adalah media yang bisa digunakan perusahaan untuk memberikan informasi kegiatan ekonomi perusahaan dalam memberikan pengaruhnya di masyarakat dan lingkungan. Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan karena perusahaan mempunyai kontrak dengan stakeholder.

2.1.6 Komisaris Independen

KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memberikan definisi komisaris yaitu bagian dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan praktek tata kelola perusahaan. Komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri. KNKG menjelaskan komisaris independen mempunyai tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khan *et al* (2012) menyatakan

bahwa komisaris independen mempunyai tujuan untuk memperkuat jajaran komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Wardhani (2008) menambahkan bahwa fungsi utama dari komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Komisaris independen mempunyai peran yang penting dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2010) menjelaskan komisaris independen memberikan tuntutan yang lebih ke pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memastikan keselarasan antara kegiatan perusahaan dan nilai sosial atau legitimasi perusahaan. Khan *et al* (2012) berkesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kesimpulannya adalah komisaris independen adalah bagian dari dewan komisaris yang berfungsi memberi saran kepada direksi agar melakukan praktek tata kelola perusahaan secara independen. Kesimpulan lain adalah komisaris independen memberikan tuntutan kepada direksi agar melakukan kegiatan tanggung jawab sosial agar ada keselarasan antara nilai perusahaan dan nilai sosial.

2.1.7 Komite Audit

KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia memberikan penjelasan bahwa komite audit adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif. Coley Jr *et al* (dalam Hadiprajitno, 2012) juga memberikan definisi bahwa komite audit merupakan komite yang kritical dan

banyak otoritas pengawasan pasar modal dunia mengharuskan perusahaan memilikinya. Coley Jr *et al* menambahkan komite ini bertujuan untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris. Pada penelitian Khan *et al* (2012), komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena komite audit menyediakan saran yang terbaik kepada komisaris tentang operasional perusahaan. Kesimpulan pernyataan itu adalah komite audit mempunyai hubungan dengan dewan komisaris yaitu memberikan saran kepada komisaris dalam mengendalikan perusahaan agar ada keselarasan antara nilai perusahaan dan nilai sosial.

2.1.8 Kepemilikan Publik

Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan *et al* (2012) memberikan penjelasan bahwa perusahaan yang sudah masuk bursa dan mempunyai kepemilikan publik yang besar menyebabkan perusahaan mempunyai *stakeholder* yang semakin besar sehingga harus memberikan pengungkapan tambahan berupa laporan tentang kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab kepada *stakeholder*. Khan *et al* akhirnya mendapatkan hasil bahwa kepemilikan publik mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan yang bisa diambil

adalah kepemilikan publik mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.9 Kepemilikan Asing

Khan *et al* (2012) menjelaskan bahwa investor asing sewajarnya mempunyai nilai dan pengetahuan yang berbeda karena dari pasar modal asing. Oleh karena itu, perusahaan yang dimiliki pihak asing diharapkan untuk menyediakan laporan yang lebih banyak termasuk laporan sosial dan lingkungan untuk pengambilan keputusan. Tanimoto dan Suzuki (dalam Novita *et al*, 2008) membuktikan bahwa kepemilikan asing di perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong penggunaan GRI dalam pengungkapan sosial. Novita *et al* juga berkesimpulan bahwa negara-negara asing cenderung lebih perhatian terhadap aktivitas serta pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kesimpulan yang didapat adalah kepemilikan publik mempunyai hubungan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan luas pengungkapan *Corporate Social Responsibility* dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

NO	PENELITI	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
1	Novita Machmud dan Chaerul D. Djakman (2008)	Luas pengungkapan tanggung jawab sosial, kepemilikan asing dan kepemilikan institusional	Regresi berganda	Kepemilikan asing dan kepeilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
2	Rizky Mulia (2010)	Luas pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> , ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit independen, konsentrasi kepemilikan, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, kepemilikan asing, dan kepemilikan pemerintah	Regresi berganda	Kepemilikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan.

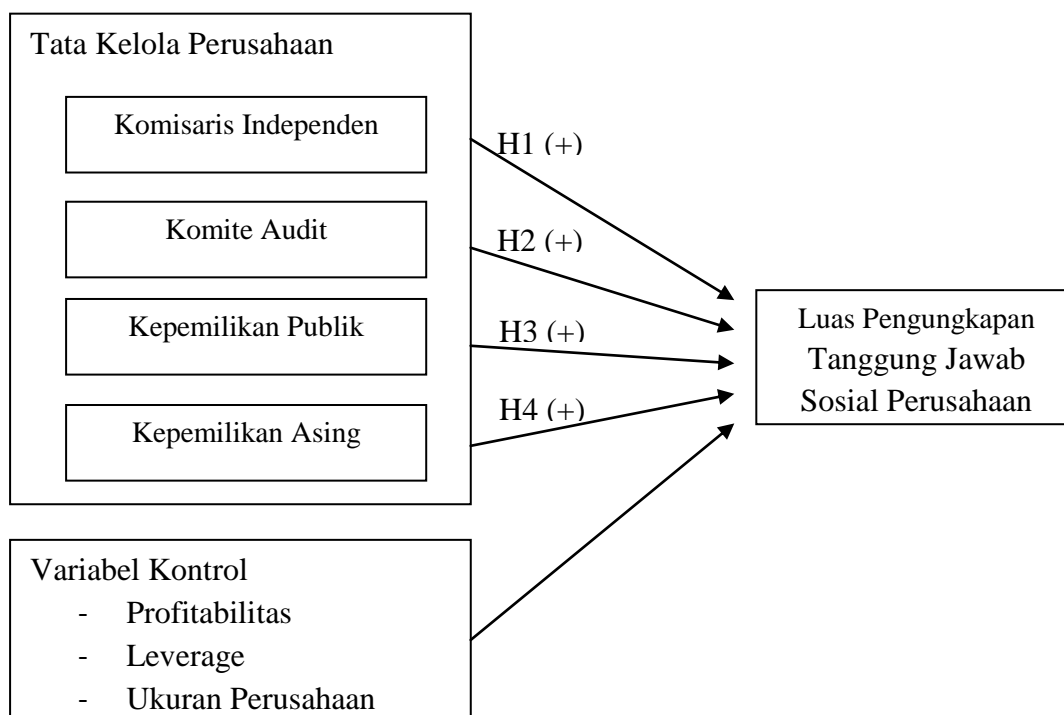
N O	PENELITI	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
3	Aegidius Mardi (2010)	Luas pengungkapan CSR, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komisaris independen dalam komite audit, konsentrasi kepemilikan saham, kepemilikan direksi, kepemilikan asing, kepemilikan pemerintah	Regresi berganda	Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan CSR sedangkan variabel lain tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR
4	Andriyati M. Sinaga (2011)	Pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan, ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, ukuran komite audit, independensi komite audit, frekuensi rapat komite audit	Regresi berganda	Ukuran komisaris, frekuensi rapat dewan komisaris, dan independensi komite audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan variabel yang lain tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan.

N O	PENELITI	VARIABEL	METODE PENELITIAN	HASIL
5	Yunita Ratnasari (2011)	Luas pengungkapan CSR dalam <i>sustainability report</i> , ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dewan komisaris independen, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit	Regresi berganda	Semua variabel penelitian tidak signifikan terhadap luas pengungkapan CSR dalam <i>sustainability report</i>
6	Arifur Khan, Mohamma d Badrul Muttakin, dan Javed Siddiqui (2012)	Luas Pengungkapan CSR, kepemilikan publik, kepemilikan asing, komisaris independen, komite audit, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage	Regresi berganda	Kepemilikan publik, kepemilikan asing, komisaris independen, komite audit, profitabilitas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan CSR.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran yang disusun berdasarkan uraian teoritis dan hasil penelitian terdahulu dapat dilihat di Gambar 2.1.

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

2.4.1 Komisaris Independen dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk

kepentingan mereka sendiri. KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memberikan definisi komisaris yaitu bagian dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan praktek tata kelola perusahaan. KNKG menjelaskan komisaris independen mempunyai tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khan *et al* (2012) berkesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Khan (2010) berkesimpulan bahwa komisaris independen berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena komisaris independen memberikan tekanan yang lebih kepada perusahaan untuk melaporkan kegiatan sosial agar ada keselarasan antara nilai perusahaan dan nilai sosial. Hasil berbeda didapat dalam penelitian Mulia (2010), Mardi (2010), Ratnasari (2011) dan Sinaga (2011) yang berkesimpulan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap pelaporan tanggung jawab sosial perusahaan. Mulia (2010) berkesimpulan komisaris independen tidak mempengaruhi pengambilan keputusan karena mereka tidak terlibat dalam operasional perusahaan dan tidak mempunyai kualifikasi yang memadai sebagai komisaris.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis pertama sebagai berikut:

H1 : Komisaris independen berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2.4.2 Komite Audit dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia memberikan penjelasan bahwa salah satu fungsi komite audit sebagai bagian dalam perusahaan adalah membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif. Coley Jr *et al* (dalam Hadiprajitno, 2012) menjelaskan bahwa komite audit merupakan komite yang kritis dan banyak otoritas pengawasan pasar modal dunia mengharuskan perusahaan memilikinya. Coley Jr *et al* menambahkan komite ini bertujuan untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris.

Khan *et al* (2012) berkesimpulan komite audit mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan karena komite audit berusaha memberikan saran terbaik untuk dewan komisaris dalam menyelaraskan nilai perusahaan dan nilai sosial pada perusahaan-perusahaan di Bangladesh. Hasil berbeda dikemukakan oleh Sinaga (2011) dan Ratnasari (2011) bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan publik di Indonesia. Sinaga (2011) menjelaskan bahwa komite audit menjadi tidak berpengaruh karena tidak

dapat menjalankan tugas dengan semestinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan dengan menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis kedua sebagai berikut:

H2 : Komite audit berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2.4.3 Kepemilikan Publik dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Solomon (2007) menyatakan bahwa teori *stakeholder* merupakan suatu gagasan untuk pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Perusahaan menjadi aktif untuk melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan untuk memuaskan kepentingan dari seluruh *stakeholder*. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan citra perusahaan agar perusahaan terus mendapat dukungan dari *stakeholdernya* melalui keputusan-keputusan yang diambil *stakeholder*. Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan *et al* (2012) menemukan hasil bahwa kepemilikan publik berpengaruh positif secara signifikan terhadap pengungkapan sosial perusahaan karena mempunyai jumlah *stakeholder* yang semakin besar. Sobhan dan Werner (dalam Khan, 2012) memberikan hasil yang berbeda. Sobhan dan Werner

beralasan bahwa biasanya publik kurang mengerti tentang laporan keuangan dan hanya mencari insentif yang jelas seperti dividen sehingga kebanyakan tidak datang saat rapat umum pemegang saham.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis ketiga sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan publik berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan

2.4.4 Kepemilikan Asing dan Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Akhtaruddin (dalam Mulia, 2010) menyatakan bahwa tata kelola perusahaan menyediakan kerangka pengendalian internal yang bisa mengurangi masalah dalam teori agensi. Tata kelola perusahaan dianggap mampu mengatasi masalah keagenan karena ada pengawasan yang intensif terhadap perilaku oportunistik manajer dan kecenderungan untuk menutup-nutupi informasi untuk kepentingan mereka sendiri. Khan *et al* (2012) menjelaskan perusahaan yang dimiliki oleh pihak asing cenderung memiliki pengetahuan dan nilai yang berbeda karena berasal dari pasar modal yang berbeda sehingga butuh informasi yang lebih banyak untuk pengambilan keputusan. Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan *et al* (2012) menemukan hasil bahwa perusahaan yang mempunyai kepemilikan asing yang besar cenderung mengungkapkan laporan sosial lebih banyak. Tanimoto dan Suzuki (dalam Novita *et al*, 2008) membuktikan bahwa kepemilikan asing di perusahaan publik di Jepang menjadi faktor pendorong penggunaan GRI dalam pengungkapan sosial. Novita *et al* (2008), Mulia (2011), dan Mardi (2011) mendapatkan hasil yang berbeda yaitu kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia. Novita *et al* (2008) memberikan alasan bahwa kepemilikan asing pada perusahaan di Indonesia secara umum belum mempedulikan masalah lingkungan dan sosial sebagai isu kritis yang dianjurkan untuk diungkapkan dalam laporan tahunan.

Ketidakkonsistenan dari penelitian-penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian ini mempunyai hipotesis keempat sebagai berikut:

H4 : Kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasi

3.1.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan perusahaan. Luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam laporan tahunan ini diukur berdasarkan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang disusun oleh Sembiring (2005) yang memaparkan tujuh kategori kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan industri manufaktur dengan total item adalah 78, yaitu lingkungan, energi, kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, lain-lain tenaga kerja, produk, keterlibatan masyarakat dan umum..

Metode yang digunakan untuk mengukur indeks yang telah dibentuk tersebut adalah dengan cara *content analysis* yaitu nilai 1 untuk setiap *item* yang diungkapkan serta 0 untuk *item* yang tidak diungkapkan dalam kategori-kategori yang sudah ditentukan (Novita *et al*, 2008). Khan (2010) menjelaskan tentang cara penghitungan indeks pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada laporan tahunan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{IPCSR} = \frac{\text{Jumlah skor item pengungkapan yang diungkapkan}}{\text{Skor maksimum item pengungkapan}} \quad (3.1)$$

Keterangan:

IPCSR : Indeks Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

3.1.2 Variabel Independen

3.1.2.1 Komisaris Independen

KNKG dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia memberikan definisi komisaris yaitu bagian dalam perusahaan yang berfungsi dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan menyediakan saran kepada dewan direksi dan memastikan perusahaan melaksanakan praktek tata kelola perusahaan. Komisaris independen tidak boleh mempunyai hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dewan komisaris lain, dan perusahaan itu sendiri. KNKG menjelaskan komisaris independen mempunyai tugas untuk menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Khan *et al* (2012) menyatakan bahwa komisaris independen mempunyai tujuan untuk memperkuat jajaran komisaris dalam mengawasi kinerja perusahaan. Wardhani (2008) menambahkan bahwa fungsi utama dari komisaris independen adalah menjalankan fungsi pengawasan yang bersifat independen terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Penelitian terdahulu tentang komisaris independen menemukan bahwa variabel komisaris independen dapat diukur dari proporsi komisaris independen terhadap total komisaris (Khan, 2012). Pada penelitian ini, komisaris independen dihitung dengan cara proporsi komisaris independen terhadap total komisaris di perusahaan yang diungkapkan di dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Komisaris Independen} = \frac{\text{Total komisaris independen}}{\text{Total komisaris}} \quad (3.2)$$

3.1.2.2 Komite Audit

KNKG dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia memberikan penjelasan bahwa komite audit adalah bagian dalam perusahaan yang bertugas membantu dewan komisaris memastikan struktur pengendalian internal sudah cukup dan efektif. Coley Jr *et al* (dalam Hadiprajitno, 2012) memberikan definisi bahwa komite audit merupakan komite yang kritikal dan banyak otoritas pengawasan pasar modal dunia mengharuskan perusahaan memilikinya. Komite audit bertujuan untuk membantu fungsi pengawasan dewan komisaris.

Ratnasari (2012) pernah meneliti tentang komite audit dan berpendapat bahwa variabel komite audit dapat diukur dengan cara menghitung banyak anggota komite audit di suatu perusahaan. Pada penelitian ini, komite audit diukur dengan cara menghitung banyaknya anggota komite audit perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan.

3.1.2.3 Kepemilikan Publik

Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan (2012) berpendapat bahwa kepemilikan publik adalah total kepemilikan yang dimiliki oleh publik dan bukan dimiliki oleh pihak intern perusahaan. Kepemilikan publik dapat dihitung dengan cara proporsi kepemilikan publik yang dimiliki publik terhadap total saham. Pada penelitian ini, kepemilikan

publik diukur dengan cara proporsi saham yang dimiliki publik terhadap total saham yang dilaporkan dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Kepemilikan publik} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki oleh publik}}{\text{Total saham}} \quad (3.3)$$

3.1.2.4 Kepemilikan Asing

Peran RUPS diatur dalam Pedoman Umum Corporate Governance Indonesia. RUPS merupakan organ di dalam perusahaan sebagai wadah dari para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting sesuai dengan modal yang ditanam. KNKG juga menjelaskan bahwa keputusan yang diambil oleh RUPS harus memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan atau *stakeholder*.

Khan (2012) dalam meneliti tentang kepemilikan asing berpendapat bahwa kepemilikan publik adalah total kepemilikan yang dimiliki oleh investor asing yang menanamkan saham di suatu perusahaan. Kepemilikan asing dalam penelitian ini menggunakan persentase pemilikan saham asing yang dimiliki investor asing terhadap total saham dalam laporan tahunan perusahaan.

$$\text{Kepemilikan asing} = \frac{\text{Total saham yang dimiliki investor asing}}{\text{Total saham}} \quad (3.4)$$

3.1.2.5 Variabel Kontrol

Variabel kontrol adalah variabel yang diperkirakan bisa memberikan pengaruh tetapi bukan merupakan dalam tujuan penelitian (Hadiprajitno, 2012). Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah profitabilitas, *leverage* dan ukuran perusahaan karena sudah banyak dipakai untuk meneliti pengaruh tata kelola perusahaan dengan luas pengungkapan tanggung jawab sosial dan mampu menggambarkan kondisi keuangan perusahaan. Penelitian Khan

(2010) memaparkan definisi dan operasionalisasi dari variabel kontrol profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari modal. Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio *return on equity* yaitu proporsi laba terhadap total modal. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang dari ekuitas. *Leverage* diukur dengan menggunakan *debt to equity ratio* yaitu proporsi total hutang terhadap total modal. Ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset perusahaan yang menggambarkan kekayaan perusahaan dan diubah dalam bentuk natural logaritma agar data yang didapat tidak terlalu besar.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total Ekuitas}} \quad (3.5)$$

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total hutang}}{\text{Total ekuitas}} \quad (3.6)$$

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Log} (\text{nilai buku total aset}) \quad (3.7)$$

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan sampel perusahaan industri dasar dan kimia yang diambil dari Bursa Efek Indonesia mempunyai alasan yaitu laporan tahunan perusahaan yang *go public* lebih mudah didapat dan perusahaan industri dasar dan kimia adalah bagian dari kelompok perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia yang berhadapan langsung dengan lingkungan sehingga wajib melakukan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaporkannya sesuai dengan PP Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Pengambilan sampel perusahaan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menyajikan laporan tahunan tahun 2010 sampai 2011
2. Perusahaan yang menyajikan laporan informasi tanggung jawab sosial pada laporan tahunan tersebut.
3. Perusahaan yang mempunyai laba positif pada tahun 2010 dan 2011.

Batas waktu pengumpulan data adalah 31 Agustus 2012. Setiap sampel perusahaan yang tidak memenuhi kriteria sampai batas waktu yang ditentukan akan dikeluarkan dari sampel perusahaan. Setiap sampel perusahaan memiliki 2 laporan tahunan sehingga sampel penelitian adalah 2 x sampel perusahaan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis data penelitian ini adalah data sekunder, yaitu berupa laporan tahunan perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data yang akan digunakan merupakan data publikasi yang berupa laporan tahunan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) atau situs resmi perusahaan. Sumber data tersebut diperoleh dari Pojok Bursa Efek Indonesia (BEI) Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory*, situs resmi Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id, dan situs resmi perusahaan

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan mempelajari data dan dokumen-dokumen yang diperlukan. Data dan dokumen-dokumen itu merupakan laporan tahunan yang diperoleh dari Pojok BEI Universitas Diponegoro, *Indonesian Capital Market Directory*, dan website BEI www.idx.co.id dan situs resmi perusahaan.

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan informasi umum mengenai data yang akan diuji dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan adalah *mean*, nilai maksimum, nilai minimum, dan standar deviasi.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

3.5.2.1 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi antar variabel bebas. Menurut Ghozali (2006) cara yang dapat digunakan untuk menguji ada tidaknya korelasi antar variabel bebas adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan lawannya, *variance inflation factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* ≤ 0.10 atau sama dengan nilai *VIF* ≥ 10 . Selain menggunakan nilai *tolerance* dan *VIF*, cara yang dapat digunakan untuk mengetahui derajat multikolinearitas adalah dengan melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen. Jika tingkat korelasi di bawah 95%, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius.

3.5.2.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006). Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Kemudian Ghazali (2006) menyatakan ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya Heteroskedastisitas. Cara pertama adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) dengan residualnya. Dasar untuk menganalisis grafik plot adalah:

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Cara yang kedua untuk mendeteksi heteroskedastisitas adalah dengan Uji Park. Gujarati (dalam Ghazali, 2006) menjelaskan cara bekerja Uji Park adalah dengan meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi Heteroskedastisitas.

3.5.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2006). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara analistik grafik dan uji statistik.

1. Analisis Grafik

Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika

distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

2. Analisis Statistik

Uji yang digunakan adalah uji statistik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Dasar pengambilan keputusan pada analisis *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-Sample K-S) adalah apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual tidak terdistribusi secara normal. Sedangkan apabila nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* lebih besar dari 0.05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2006). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Pada penelitian ini, alat analisis yang digunakan dalam uji autokorelasi adalah Runs Test. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, tidak terjadi autokorelasi.

3.5.3 Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk mengukur kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap luas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{IPCSR} = & \alpha + \beta_1 \text{KIN} + \beta_2 \text{KAU} + \beta_3 \text{PUB} + \beta_4 \text{FOR} + \beta_5 \text{ROE} + \beta_6 \text{LEV} \\ & + \beta_7 \text{SIZE} + \varepsilon \end{aligned} \quad (3.8)$$

Keterangan:

IPCSR : Indeks Pengungkapan CSR (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan)

α : Konstanta

β : Koefisien regresi

KIN : Komisaris Independen

KAU : Komite Audit

PUB : Kepemilikan Publik

FOR : Kepemilikan Asing

ROE : Profitabilitas

LEV : *Leverage*

SIZE : Ukuran Perusahaan

ε : *Error term*

3.5.4 Uji Hipotesis

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2006). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Dalam praktiknya, ukuran yang digunakan untuk menilai koefisien determinasi adalah nilai Adjusted R^2 . Tidak seperti nilai R^2 yang dapat

menimbulkan bias, nilai Adjusted R^2 dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model.

3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara bersama-sama variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

3.5.4.3 Uji Signifikan Parameter Individual (Uji Statistik t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2006). Pengujian dilakukan dengan mengukur nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi ≤ 0.05 maka hipotesis tidak dapat ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya jika nilai probabilitas signifikansi ≥ 0.05 maka hipotesis ditolak. Ini berarti secara individual variabel independen tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel dependen.